

Banyak Masalah Aset Belum Terjawab

PONTIANAK. Komisi A DPRD Kalbar menilai, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalbar tentang aset daerah belum detail. Masih banyak permasalahan aset daerah yang belum terjawab dalam LHP BPK-RI.

"Kalau saya dengar LHP BPK RI yang disampaikan Pak Rizal Ramli (Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar, red), para rapat paripurna DPRD Kalbar, Kamis (3/11), belum menjawab semua permasalahan aset di Kalbar," kata H Retno Pramudya SH MH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar, kemarin.

Dikatakan Retno, pemeriksaan yang dilakukan BPK hanya sebatas audit manajemen pengelolaan aset serta mendata aset. Sedangkan persoalan lainnya, seperti nilai aset secara keseluruhan,

serta penguasaan aset yang ada, belum disikapi serius.

"Pengelolaan aset tak semuanya dilakukan Pemprov Kalbar. Kita masih mempertanyakan seberapa banyak aset Pemprov yang dikuasai pihak lain. Selain itu, mekanisme kerjasama pengelolaan aset juga tidak mengikuti aturan," tegas Retno.

Legislator PPP tersebut menegaskan, salah satu contoh kerjasama pengelolaan aset yang tidak melalui mekanisme, pemanfaatan lahan KONI Kalbar. Kerjasama dilakukan Pemprov Kalbar yang ditandatangani Sekda Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie dengan PT Citra Putra Mandiri (CPM). Mengacu pada hasil audit BPK RI tahun 2010, ada temuan penyerahan uang Rp8 miliar oleh

PT CPM kepada Pemprov Kalbar. Sedangkan kerjasama tersebut dilakukan Pemprov dengan PT CPM, tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPRD Kalbar.

Padahal sudah jelas aturan yang mengatur pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang akan mengelola aset daerah. Aturan yang menegaskan adanya pembahasan dan persetujuan DPRD dalam pengelolaan aset daerah yang dilakukan pihak ketiga sudah dilanggar. Aturan tersebut meliputi UU Nomor 12/2008, perubahan kedua UU Nomor 32/2004, pasal 42 ayat 1 (k). Kemudian UU Nomor 27/2009, pasal 293 ayat 1 (i). PP Nomor 6/2006, Permendagri Nomor 17/2007 tentang pengelolaan barang milik daerah. PP No-

mor 50/2007 tentang kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

"Inti dari semua aturan tersebut, kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, harus ada persetujuan DPRD. Mekanisme kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak ketiga, menyangkut aset daerah, mesti dibahas dan mendapatkan persetujuan DPRD. Selain itu, kerjasama dilakukan melalui tender. Sementara aturan tersebut tidak dilakukan Pemprov Kalbar maupun PT CPM," tegas Retno.

Dikatakan Retno, DPRD Kalbar belum pernah mendapatkan laporan terkait pengalihan fungsi lahan KONI Kalbar yang katanya

akan dibangun pusat perbelanjaan. Bahkan DPRD tidak pernah memberikan persetujuan atas kerjasama antara Pemprov dengan PT CPM. Sehingga belum bisa diketahui, seberapa besar keuntungan atau pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh Pemprov Kalbar dari kerjasama tersebut.

"Hingga saat ini kita belum pernah mendapatkan berkas dari kerjasama antara Pemprov Kalbar dengan PT CPM. Jadi, bagaimana kita bisa tahu, apakah Pemprov diuntungkan atau justru sebaliknya dari kerjasama tersebut," paparnya. Retno menegaskan, karena masih banyak aset Kalbar yang simpang-siur, maka sudah menjadi kewajiban DPRD Kalbar untuk membentuk Pansus Aset.

Apalagi pembentukan Pansus Aset tersebut merupakan aspirasi dari 21 dari 55 anggota DPRD Kalbar. Bahkan surat usulan pembentukan Pansus tersebut sudah tiga kali dilayangkan ke Ketua DPRD Kalbar, Minsin SH. Anehnya, hingga saat ini Ketua DPRD Kalbar tidak menggubris usulan tersebut. Mestinya Ketua DPRD Kalbar menghormati aspirasi anggota DPRD Kalbar yang telah mengusulkan pembentukan Pansus Aset tersebut.

"Kalau dikatakan DPRD Kalbar hanya omong kosong membentuk Pansus Aset, itu juga tidak benar. Kami sudah mengusulkan pembentukan Pansus Aset tersebut. Bahkan sudah pernah dilakukan rapat Komisi dan Fraksi dengan unsur pimpinan DPRD membahas



H Retno Pramudya. KHOLIL YAHYA

pembentukan Pansus Aset. Hasil dalam rapat tersebut, Pansus Aset disetujui dibentuk. Anehnya, hingga saat ini tidak digubris oleh Ketua DPRD sendiri," kesal Retno. (amk)